

**IMPLEMENTASI PENGUPAHAN TENAGA KERJA *HOME*  
*INDUSTRY* KERUPUK DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus Di *Home Industry* Kerupuk Desa Sumberagung  
Kecamatan Ngraho Bojonegoro)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**SRI YULIANA**

**NIM : G74215110**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Yuliana

NIM : G74215110

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industry*  
Kerupuk Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di  
*Home Industry* Kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Sri Yuliana

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Sri Yuliana NIM. G74215110 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Maret 2019

Pembimbing,



Achmad Room Fitrianto, S.E., M.E.I

NIP. 197706272003121002

## PENGESAHAN

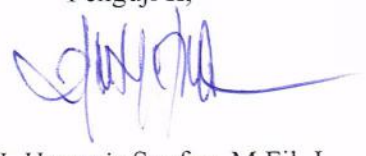
Skripsi yang ditulis oleh Sri Yuliana NIM. G74215110 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 01 April 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :


Penguji I

  
Achmad Room Fitrianto, M. E. I.  
NIP. 197706272003121002

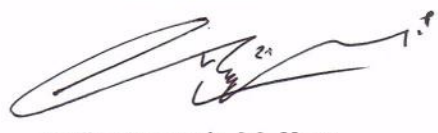
Penguji II,

  
Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil. I.  
NIP. 197510162002121001

Penguji III,

  
Deasy Tantiyana, M. M.  
NIP. 198312282011012009

Penguji IV,

  
Andhy Permadi, M. Kom.  
NIP. 198110142014031002

Surabaya, 01 April 2019

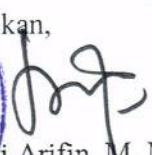
Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Dr. H. Ali Arifin, M. M.  
NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sri Yuliana  
NIM : G74215110  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail address : [Ana38666@gmail.com](mailto:Ana38666@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi    ☐ Tesis    ☐ Desertasi    ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industry* Kerupuk Ditinjau Dari

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di *Home Industry* Kerupuk Desa Sumberagung Ngraho

Bojonegoro).

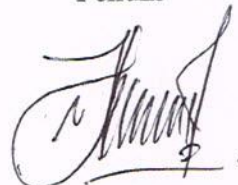
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 April 2019

Penulis

  
( Sri Yuliana )



## Abstrak

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industry* Kerupuk Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di *Home Industry* Kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro)”**. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pengupahan tenaga kerja *home industry* kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro dan bagaimana implementasi pengupahan tenaga kerja *home industry* kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengupahan tenaga kerja dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu studi kasus deskripsi yaitu membuat deskripsi secara berurutan dan valid mengenai fakta-fakta tentang pengupahan tenaga kerja *home industry* dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu guna menganalisis data yang sudah diperoleh untuk kemudian menjawab permasalahan. Untuk pengumpulan data penulis melakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengupahan tenaga kerja yang ada di *home industry* kerupuk Desa Sumberagung belum sepenuhnya sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena pada saat melakukan kesepakatan kerja pemilik usaha tidak menyebutkan jumlah upah yang akan diterima pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, dalam membayar upah pekerja pemilik usaha tidak pernah menunda-tunda dan selalu tepat pada waktu yang sudah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diharapkan agar setiap pemilik usaha sebelum mempekerjakan seseorang haruslah memberitahu jumlah upah yang akan diterima pekerja terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan. Supaya nantinya tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Pengupahan, Tenaga Kerja, *Home Industry* Kerupuk.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	3
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Kajian Pustaka .....	13
E. Tujuan Penelitian .....	20
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	20
G. Definisi Operasional .....	21
H. Metode Penelitian .....	22
1. Data yang Dikumpulkan .....	23
2. Sumber Data .....	23
3. Teknik Pengumpulan Data .....	24
4. Teknik Pengolahan Data .....	26
5. Teknik Analisis Data .....	27
I. Sistematika Pembahasan .....	28
BAB II PENGUPAHAN DALAM EKONOMI ISLAM.....	30
A. Definisi dan Dasar Hukum Upah/Ijarah.....	31
B. Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja .....	36





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur	
2017-2018 .....	7
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3.1 Mata Pencapaian Pokok .....	51
Tabel 3.2 Data pekerja <i>home industry</i> kerupuk .....	55
Tabel 3.3 Upah pekerja yang pernah bolos.....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada masyarakat yang agraris, dimana mayoritas mengandalkan usaha pertanian, menjadikan industri rumah tangga sebagai salah satu sumber pendapatan tambahan. Masyarakat menjadikan *home industry* sebagai sarana alternatif sumber pendapatan ketika sektor pertanian dalam masa menunggu panen. Dengan besaran upah yang ditawarkan dan masa kerja yang tidak dipengaruhi musim menjadikan industri rumah tangga memiliki dua fungsi: sebagai penopang perekonomian lokal dan sebagai tulang punggung perekonomian keluarga.

Adil dan layak bagi kelangsungan hidup pekerja dan keluarga seyogyanya menjadi acuan dalam memberikan upah kepada pekerja. Namun demikian, kondisi yang terjadi dilapangan para buruh sering melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah. Hal ini terjadi karena upah yang diterima pekerja tidak sebanding dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk mengkaji proses pengupahan dalam kasus *home industry* kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro.

Bab pendahuluan dalam skripsi ini terdiri dari 8 sub bab. Pertama menjelaskan latar belakang masalah, dalam sub bab ini dijabarkan alasan peneliti tertarik untuk meneliti topik yang akan di teliti. Sub bab kedua

yaitu identifikasi dan batasan masalah yang menjelaskan masalah-masalah yang kemungkinan akan muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi. Kemudian masalah yang diidentifikasi tersebut dibatasi, dengan tujuan agar masalah yang akan diteliti jelas mana saja yang masuk dan mana yang tidak masuk.

Sub bab ketiga yaitu rumusan masalah yang berisi tentang satu atau lebih pertanyaan yang akan dijawab dengan melalui penelitian. Sub bab keempat yaitu kajian pustaka yang memuat tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Tujuannya adalah agar tidak terjadi duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Sub bab kelima adalah tujuan penelitian yang berisi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan tujuan yang ingin dicapainya.

Sub bab keenam yaitu kegunaan hasil penelitian yang memuat tentang kegunaan atau manfaat dari segi teoritis dan dari segi praktis. Sub bab ketujuh yaitu definisi operasional yang menjelaskan tentang pengertian dari variabel penelitian secara operasional. Variabel yang didefinisikan bukan kata per kata, akan tetapi variabel yang dipandang masih belum operasional saja. Sub bab kedelapan yaitu metode penelitian yang memuat data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.



masyarakat sekitar yang pengangguran untuk dapat bekerja dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

Pemberian upah kepada pekerja atau buruh adalah suatu wujud pemberian kompensasi yang diberikan kepada pekerja oleh pemilik usaha. Kompensasi dapat berupa uang dan bagi pekerja merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada. Untuk kelangsungan hidup buruh, gaji atau upah yang diterima merupakan penunjang bagi kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan gaji atau upah yang diberikan kepada pekerja bagi industri atau perusahaan merupakan sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi industri tersebut. Oleh karenanya, antara pemilik usaha dengan pekerja hubungan keduanya harus terjalin dengan baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing.<sup>3</sup>

Pengertian upah secara umum dapat diartikan sebagai pembayaran yang diterima pekerja atau buruh dari pemilik usaha selama pekerja tersebut melaksanakan suatu pekerjaan.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian upah menurut UU No. 13 Tahun 2003 yaitu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

<sup>3</sup> Ismail Fahmi Arrauf Nst, Muhammad Riza dan Tri Novita, “Sistem Pembayaran Upah Pekerja Pada Home Industri Bolu Ikan Di Kota Langsa”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 1 No. 1 (2017), 1.

<sup>4</sup> Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 4 No. 1 (Juli 2013), 2.

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>5</sup>



Pemilik usaha dengan pekerja harus melakukan kesepakatan dalam menetapkan upah minimum. Pemilik usaha dalam memberi upah minimum tidak boleh lebih rendah atau bertentangan dengan perundang-undangan. Dalam hal ini apabila lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum maka dapat dilakukan penangguhan.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 89 upah minimum terdiri dari upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.<sup>8</sup> Berikut daftar upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.





“Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada kenyataan bahwa ia mengharuskan orang yang menerima jasa atau layanan agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut. Orang yang memberikan atau menjual jasanya, tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda.” Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu, menurut Rasulullah, seseorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja sesegera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).

Artinya : “Dari Abdullah ibn ‘Umar katanya: Rasulullah SAW. bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibn Majah).<sup>14</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu

<sup>13</sup> Septi Wulan Sari, "Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 4 No. 1 (Juli 2013), 8.

<sup>14</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 191.

sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan.

Penundaan pembayaran tersebut orang yang menunda membayar hutangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Jika seseorang berhutang kepada orang lain, maka orang tersebut harus segera membayarnya saat ia mampu, sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَيْ  
ظُلْمٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya : “Dari Abu Hurayrah RA. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, “Orang kaya yang menunda (membayar utangnya) adalah zalim” (HR. al-Bukhari).<sup>15</sup>

Di dalam Islam juga diharuskan secara pasti dan secepatnya dalam pemberian upah. Aturan ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam persoalan ini. Majikan harus memberitahukan upah sebelum seorang pekerja dipekerjakan. Mempekerjakan orang tanpa memberitahukan lebih dahulu upahnya adalah haram. Dilaporkan oleh Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi SAW melarang mempekerjakan seseorang tanpa memberitahu upahnya.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Idri, *Hadith Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadith Nabi)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 119.

<sup>16</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 194.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Berdasarkan penjelasan diatas, Pengupahan pada *home industry* kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro. Dalam *home industry* Kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro terdapat 9 orang karyawan. Sistem pengupahannya menggunakan sistem upah mingguan dan sistem upah borongan. Pada *home industry* kerupuk ini sistem pengupahannya berdasarkan bidang pekerjaannya. Pemilik usaha *home industry* kerupuk pada awal kesepakatan kerja atau kontrak kerja tidak menyebutkan jumlah upah yang akan diberikan kepada pekerja. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan Syari'at Islam. Disebutkan juga dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 91 bahwasanya dalam memberikan upah kepada pekerja tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.







2.	Septi Wulan Sari	Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten dan Hukum Ekonomi Islam	untuk mendeskripsikan tentang sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung baik dari ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten Tulungagung dan juga menurut Hukum Ekonomi Islam	Sama-sama membahas Upah pekerja menurut Ekonomi Islam	Lokasi penelitian. Disini meneliti di karangrejo Tulungagung . Sedangkan peneliti saat ini di Ngraho Bojonegoro.
3.	Ismail Fahmi Arrauf Nst, Muhammad Riza, Tri Novita	Sistem Pembayaran Upah Pekerja Pada Home Industri Bolu Ikan Di Kota Langsa	untuk meneliti sistem pengupahan yang dilakukan pada <i>home industry</i> bolu ikan di Kota Langsa dalam pandangan Ekonomi Islam.	Metode penelitian menggunakan kualitatif	Lokasi penelitian
4.	Rachmad Firmansyah	Proses Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pengupahan Dalam Perspektif Islam	Untuk mengetahui Proses Perumusan Upah Minimum hingga Penetapan Kebijakan Pengupahan Dalam	Metode penelitian kualitatif	Meneliti tentang proses perumusan upah minimum dan penetapan kebijakan pengupahan. Sedangkan



Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Septi Wulan Sari dengan judul “*Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten dan Hukum Ekonomi Islam*”. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang sistem pengupahan pekerja bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung baik dari ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten Tulungagung dan juga menurut Hukum Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukknn bahwa sistem

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ismail Fahmi Arrauf Nst, Muhammad Riza, Tri Novita dengan judul “*Sistem Pembayaran Upah Pekerja Pada Home Industri Bolu Ikan Di Kota Langsa*”. Yang bertujuan untuk meneliti sistem pengupahan yang dilakukan pada *home industry* bolu ikan di Kota Langsa dalam pandangan Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah Pembayaran upah pekerja pada *home industry* bolu ikan di Kota Langsa sudah sesuai berdasarkan analisis ekonomi Islam. Perrsamaaan pneliti ini dengan peneliti sekarang adalah sama-sama



menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya pada lokasi penelitian.<sup>19</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Firmansyah dengan judul “*Proses Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pengupahan Dalam Perspektif Islam*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perumusan upah minimum hingga penetapan kebijakan pengupahan dalam perspektif Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih belum memenuhi seluruh indikator pengupahan secara Islami. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada jenis penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan kualitatif. Perbedaannya yaitu peneliti ini meneliti tentang proses perumusan upah minimum dan penetapan kebijakan pengupahan. Sedangkan peneliti sekarang meneliti implementasi pengupahan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.<sup>20</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ade Kurnia, Abdul Wahab, Urbanus Uma Leu dengan judul “*Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel*”. Tujuannya untuk melihat sistem pengupahan yang diterapkan pada karyawan di *home industry* meubel dari sudut pandang ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem pengupahan pada *home industry* meubel perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala ini secara tidak langsung telah

<sup>19</sup> Ismail Fahmi Arrauf Nst, Muhammad Riza dan Tri Novita, "Sistem Pembayaran Upah Pekerja Pada Home Industri Bolu Ikan Di Kota Langsa", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 1 No. 1 (2017), 6.

<sup>20</sup> Rachmad Firmansyah, “Proses Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pengupahan Dalam Perspektif Islam”, (Skripsi – Universitas Airlangga, 2016).





1. Upah

Dalam penelitian ini, peneliti mengukur pengupahan berdasarkan:

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

Artinya : “Dari Abd Allah ibn ‘Umar katanya: Rasulullah SAW. bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibn Majah).

b. Hadith dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَحِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya : “Dari Abi sa’id al-Khudri ra bahwa Nabi SAW bersabda barang siapa yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya.” (HR. An-Nasa’i).

## 2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>24</sup>

### 3. Home Industry

*Home industry* merupakan suatu usaha atau perusahaan kecil yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi yang proses produksinya dilakukan dirumah atau tempat tinggalnya sendiri.<sup>25</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi secara berurutan dan valid mengenai fakta-fakta tentang pengupahan tenaga kerja dalam perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Bojonegoro.

<sup>24</sup> Ibid, 2.

<sup>25</sup> Ismail Fahmi Arrauf Nst, Muhammad Riza dan Tri Novita, “Sistem Pembayaran Upah Pekerja Pada Home Industri Bolu Ikan Di Kota Langsa”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 1 No. 1 (2017), 1.

### 1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang waktu dan tempat penelitian.
- b. Data tentang proses produksi kerupuk.
- c. Data tentang besarnya upah.
- d. Data tentang sistem pengupahan tenaga kerja di *home industry* kerupuk di Desa Sumberagung.
- e. Data tentang penetapan upah.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

- Sumber data primer ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden. Responden yang dimaksud di sini adalah pemilik usaha, pekerja, dan orang yang pernah bekerja di *home industry* kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pemilik usaha *home industry* kerupuk, pekerja *home industry* kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro dengan responden berjumlah 9 orang, dan orang yang pernah



Sumber data sekunder ini diperoleh dari berbagai literatur yang ada seperti jurnal, skripsi, buku-buku, internet, dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang pengupahan.

suatu penelitian, yaitu deng

Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung. Teknik ini juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.<sup>26</sup>

pengalaman:

untuk mengamati kondisi geografis, keadaan sosial disekitar *home industry* kerupuk, pendidikan, agama, proses produksi kerupuk dan praktek pengupahan *home industry* kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>27</sup> Dalam hal ini peneliti mengajukan beberapa daftar pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh narasumber. Pertanyaan ditujukan langsung kepada pemilik usaha dan pekerja *home industry* kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat rekam dan mencatat elektronik.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari instansi maupun dari perusahaan yang berhubungan dengan penelitian tersebut.<sup>28</sup> Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti buku, undang-undang, foto-foto, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengupahan yang digunakan sebagai landasan teori oleh peneliti terhadap permasalahan yang dibahas.

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 108.

<sup>28</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), 58.

a. *Editing*

b. *Organizing*

### c. *Analizing*

## 5. Teknis Analisis Data

Peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian menganalisis mengenai kegiatan, fenomena maupun situasi secara deskripsi dan mendetail. Kemudian diperkuat dengan metode observasi dan wawancara yang kemudian akan menghasilkan data yang akurat berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari pemilik dan pekerja *home industry* kerupuk di Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro. Kemudian peneliti menyimpulkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi.

## 6. Sistematika Pembahasan

## Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## Bab II : KERANGKA TEORITIS

Bab ini memuat teori-teori yang membahas mengenai upah ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

### Bab III : DATA PENELITIAN

Bab ini berisikan deskripsi peneliti mengenai gambaran umum tentang *home industry* kerupuk dan permasalahan yang terjadi yaitu pengupahan tenaga kerja *home industry* kerupuk ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di *home industry* kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro).

## BAB IV : ANALISIS DATA

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yaitu analisis terhadap implementasi pengupahan tenaga kerja *home industry* kerupuk ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di *home industry* kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro).



penentuan upah menurut perspektif Islam. Kesepakatan harus didasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pengusaha dengan pekerja. Kesepakatan ini dibangun agar tidak ada yang merasa dirugikan baik itu dari pihak pemilik kerja ataupun dari pekerja.

Dalam kesepakatan tersebut selain menentukan upah, pemilik perusahaan wajib memberitahu pekerja berapa jumlah upah yang akan diterima pekerja sebelum pekerjaan itu dimulai. Karena apabila pekerja mengetahui upah yang akan diterimanya, maka pekerja akan terdorong semangatnya untuk bekerja lebih rajin lagi. Berikut menjelaskan kerangka teori yang melandasi aspek keadilan dan transparansi dalam pengupahan dari perspektif Islam.

Dalam kesepakatan tersebut selain menentukan upah, pemilik usaha wajib memberitahu pekerja berapa jumlah upah yang akan diterima pekerja sebelum pekerjaan itu di mulai. Karena apabila pekerja sudah mengetahui upah yang akan diterimanya, maka pekerja akan lebih terdorong semangatnya untuk bekerja lebih rajin lagi. Bab ini menjelaskan kerangka teori yang melandasi aspek keadilan dan transparansi dalam pengupahan dari prespektif Islam.

30



Mengerjakan pekerjaan yang tekun, cermat dan teliti dan salah satu hak pekerja yaitu hak atas upah sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Sub bab ketiga yaitu penentuan upah kerja, sub bab ini menjelaskan bahwa penentuan upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun. Sub bab keempat yaitu upah minimum tenaga kerja, sub bab ini menjelaskan tentang upah minimum menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan menurut Islam.

Sub bab kelima yaitu kontrak/perjanjian kerja, dalam sub bab ini menjelaskan bahwa menurut Islam kontrak kerja yang baik, yaitu kontrak yang dilakukan secara tertulis oleh pekerja dan majikan. Sub bab keenam yaitu berakhirnya kontrak kerja, sub bab ini menjelaskan berakhirnya kontrak kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan menurut Islam.

### A. Definisi dan Dasar Hukum Upah/Ijarah

## 1. Definisi Upah

Dalam fiqh muamalah upah disebut dengan *Ijarah*. *Ijarah* sendiri berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa berarti “*al-‘iwadhu*” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara’, *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Lafal *ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti yang luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Definisi lain menurut ulama hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 187-188.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa upah (*ijarah*) adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Program kompensasi penting bagi organisasi karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan daya manusia sebagai komponen utama, dan merupakan komponen biaya yang paling penting. Di samping pertimbangan tersebut, kompensasi

juga merupakan salah satu aspek yang berarti bagi pegawai, karena bagi individu/pegawai besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara para pegawai itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Bila kompensasi diberikan secara benar, pegawai akan termotivasi dan lebih terpusatkan untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.<sup>32</sup>

Dengan demikian surat al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.

أَعْطُوا الْوَلَدَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرَقُهُ

Hadits di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh di tunda-tunda pembayarannya.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 191.



Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah :

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
2. Hak atas upah sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
4. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh si pekerja dalam melakukan pekerjaan.<sup>38</sup>

### C. Penentuan Upah Kerja

1. Adil

Menyangkut penentuan upah kerja, Syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun, dengan tahap mengingat ajaran Islam.

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surat An-Nahl ayat 90.

<sup>38</sup> Chairuman Pasaribu et al, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 155-156.



Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90).<sup>39</sup>

Secara teori dapat dikatakan bahwa upah yang adil adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Tentu saja penetapan tersebut dengan mempertimbangkan situasi serta faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai pekerjaan dan penetapan upah

<sup>40</sup> Chairuman Pasaribu et al, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157.

Jika pekerja tidak menerima upah yang adil, maka tingkat daya belinya akan menurun sehingga mempengaruhi bukan hanya kehidupan pekerja, melainkan juga kehidupan keluarganya dan seluruh masyarakat. Turunnya tingkat daya beli dalam jangka panjang akan merugikan perusahaan dan industri yang menyediakan barang-barang konsumsi.

## 2. Tidak Membebani Pekerja

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكَسْوَتُهُ وَلَا

تُكَلِّفُوهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ

<sup>42</sup> Chairuman Pasaribu et l, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grfika, 1994), 159.

“Seorang hamba sahaya berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaiannya, janganlah kalian bebani dia dengan pekerjaan yang di luar kemampuannya.””

Hadis di atas selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa upah haruslah mencukupi pekerja untuk mendapatkan makanan dan pakaian yang mencukupi untuk dirinya dan keluarga tanpa membebani dirinya secara berlebihan dalam pekerjaan. Hal ini dipandang oleh para sahabat Rasulullah sebagai syarat minimum.<sup>43</sup>

Dalam menentukan upah selain dua hal diatas yang harus diterapkan juga adalah asas kerelaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam Surat an-Nisaa': 29.

مِنْكُمْ

<sup>43</sup> Isnaini Harahap et al, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 82.



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ

يَخِفُّ عَرَقُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.

Hadis di atas mengandung dua hal yang penting, yaitu:

1. Sebagai Pekerja, seseorang dituntut harus menjadi pekerja keras, profesional, dan sungguh-sungguh. Hal ini diisyaratkan secara simbolis dengan perkataan Rasulullah “pekerjaan yang mengandung keringat.”
2. Upah diberikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Seseorang tidak boleh dieksploitasi tenaganya sementara haknya tidak diberikan tepat waktu tanpa ada penundaan.<sup>46</sup>

Penundaan pembayaran yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan, maka hal tersebut termasuk dzalim dan perbuatan tersebut harus dihindari bagi setiap manusia. Jika seseorang berhutang kepada orang lain, maka orang tersebut harus segera membayarnya saat ia mampu, sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَيْتِ ظُلْمٌ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya : “Dari Abu Hurayrah RA. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, “Orang kaya yang menunda (membayar utangnya) adalah zalim” (HR. al-Bukhari).<sup>47</sup>

### E. Kontrak Kerja

## 1. Tertulis

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 51 bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, mempunyai kecakapan dalam hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>48</sup>

Sedangkan dalam Syari'at Islam kontrak kerja ini digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-Ijarah*), yaitu “*ijarah a'yan*”, yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.<sup>49</sup>

Penempatan pekerja oleh seorang kapitalis adalah sebuah kontrak perdata dan dianjurkan oleh Islam bahwa semua kontrak haruslah dinyatakan secara hitam atas putih. Ketika menekankan

<sup>47</sup> Idri, *Hadith Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadith Nabi)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 119.

<sup>48</sup> Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 14.

<sup>49</sup> Chairuman Pasaribu et al, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 154.

pentingnya menulis kontrak, sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282.<sup>50</sup>

وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ

الَّتِي تَرْتَابُونَ... (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) baik kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan...” (QS. al-Baqarah [2]: 282).<sup>51</sup>

Sekalipun perintah Al-Qur'an di dalam ayat ini berhubungan dengan transaksi bisnis dan kontrak utang, sebenarnya ia berlaku untuk segala jenis kontrak. Jadi yang paling baik adalah menuliskan kontrak antara majikan dan pekerjanya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing dituangkan di dalam kontrak tersebut. Dengan demikian itu, amat baik dalam pandangan Allah dan akan mencegah timbulnya perselisihan dimasa yang akan datang.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 199.

<sup>51</sup> QS. Al-Baqarah : 282.

<sup>52</sup> Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar ...*200.



## 2. Menyebutkan Jumlah Upah

Dalam mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari, selain kontrak kerja yang secara tertulis, melainkan pada saat melakukan kontrak kerja pemilik usaha harus menyebutkan jumlah upah sebelum pekerjaan di mulai. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Nabi SAW.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd. Razzaq).<sup>53</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa terdapat petunjuk dari Rasulullah SAW, yaitu sebelum pekerja memulai pekerjaan yang akan dilakukannya, pemilik usaha terlebih dahulu harus memberitahu jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja. Sehingga dalam melakukan pekerjaannya, pekerja dapat lebih termotivasi, lebih semangat dalam bekerja, dan dapat bekerja dengan nyaman. Pekerja akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan pemilik usaha.

Al-Qur'an sendiri membicarakan mengenai sebuah kontrak jasa di dalam cerita tentang Nabi Musa di surat al-Qashash (28). Sesudah meninggalkan Mesir, ketika Musa sampai di Madyan dan menolong dua orang putri Nabi Syu'aib, maka Nabi Syu'aib memanggil beliau

<sup>53</sup> Suqiyah Mustafa'ah et al, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy dalam Hukum Islam)*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 153.

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Maka, aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan." (QS. al-Qashash [28]: 27-28).

tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa  
ucapkan.” (QS. al-Qashash [28]: 27-28).

Di dalam ayat-ayat itu, Al-Qur'an tidak hanya  
syarat-syarat kerja antara kedua orang utusan Tuhan  
melainkan juga menyebutkan bahwa kedua pihak akan  
perjanjian dan mereka jadikan Allah sebagai saksi. Ma

Adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian kerja ini adalah (Ahmad Azhar Basyir, 1993 : 192) :

- a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syara', berguna bagi perorangan atau masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syara' tidak dapat menjadi obyek perjanjian kerja.
- b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan ini dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- c. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan juga waktu pembayarannya. Sedangkan syarat-syarat mengenai subyek yang melakukan perjanjian kerja, sama dengan syarat subyek perjanjian pada umumnya.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Chairuman Pasaribu et al, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 155.



Upah merupakan suatu imbalan atas apa yang telah dikerjakan. Dalam Islam, dalam menentukan upah harus dengan cara yang layak, patut, dan tanpa merugikan kepentingan pihak manapun. Islam melarang dalam memberikan upah kepada pekerja tidak boleh berada di bawah tingkat minimum yang ditetapkan dan juga melarang adanya kenaikan upah atau gaji yang melebihi dari apa yang telah diberikan para pekerja.

**Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industry* Kerupuk Di Desa Sumberagung,  
Sebuah Temuan Lapangan**

*Home industry* kerupuk ini menggunakan dua sistem upah yaitu sistem upah mingguan dan sistem upah borongan. Sedangkan pembayaran upah diberikan kepada pekerja setiap satu minggu satu kali yaitu pada hari kamis. Bab ini menjabarkan temuan lapangan mengenai awal berdirinya, jam kerja, jumlah pekerja, kontrak kerja, dan sistem pengupahannya.

Bab ini terdiri dari 6 sub bab yang diawali dengan menjelaskan tentang gambaran umum Desa Sumberagung, dalam sub bab ini menjelaskan luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat perekonomian masyarakat Desa Sumberagung. Sub bab kedua yaitu sejarah berdirinya *home industry* kerupuk sub bab ini menjelaskan awal mula merintis usaha sampai usaha tersebut sukses.

Sub bab ketiga yaitu jumlah tenaga kerja, sub bab ini menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja di *home industry* kerupuk sebanyak 9 orang dan pekerja tersebut direkrut dari Desa Sumberagung saja. Sub bab keempat yaitu proses produksi, sub bab ini menjelaskan tentang proses awal dari bahan baku, kemudian proses pencampuran dengan molen sampai dengan proses penggorengan. Sub bab kelima yaitu kontrak kerja,

Desa Sumberagung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Luas wilayah Desa Sumberagung menurut penggunaan adalah 10.000 m<sup>2</sup>. Desa Sumberagung ini terdiri dari 4 Dusun yaitu diantaranya Dusun Dadapan, Dusun Begodo, Dusun Ngidung, dan Dusun Welang.

Adapun batas wilayah Desa Sumberagung yaitu sebelah utaranya: Desa Mojorejo, sebelah selatannya: hutan, sebelah timurnya: Ngraho, dan sebelah baratnya: Desa Sugihwaras. Jarak Desa Sumberagung ke Kecamatan 3 km, sedangkan jarak ke ibu Kota/Kabupaten adalah 60 km, dan jarak ke ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah 160 km.

Berdasarkan data tahun 2018 Jumlah penduduk untuk laki-laki berjumlah 1.360 orang. Sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 1.408 orang. Jadi total penduduk Desa Sumberagung pada tahun 2018 adalah sejumlah 2.768 orang dan jumlah kepala keluarga 780.



memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun tabel mata pencaharian pokok masyarakat Desa Sumberagung sebagai berikut.<sup>58</sup>

Tabel 3.1  
Mata Pencanharian Pokok

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Petani	675	23
2	Buruh Tani	154	134
3	PNS	4	3
4	Pedagang Keliling	3	9
5	Peternak	278	27
6	Nelayan	3	-
7	TNI	1	-
8	Pensiunan	3	1

*Sumber Data: Sekretaris Desa*

Ada juga di sektor lain yaitu *home industry* kerupuk yang mepekerjakan karyawan sejumlah 9 orang. Karyawan direkrut dari warga sekitar Desa Sumberagung saja. Dengan tujuan selain mencari keuntungan juga mengatasi pengangguran.

### B. Sejarah Berdirinya *Home Industry* Kerupuk

Sebelum merintis usaha kerupuk, dulunya Ibu Kaseni dan Bapak Marman berjualan bakso di Kota Malang. Mereka memiliki 2 orang anak laki-laki. Pada saat itu salah satu anaknya mengalami sakit dan tidak ada obatnya. Pengobatan anaknya membutuhkan biaya yang banyak sampai harta yang mereka miliki habis dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke desa.

<sup>58</sup> Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan 2019 Kabupaten Bojonegoro.

Pada Tahun 1996 mereka memulai usaha kerupuk dengan modal Rp. 1.000.000. Modal tersebut didapat dari hasil menjual rombongan bekas jualan bakso dulu, dan lain-lain. Dengan modal segitu bisa memproduksi kerupuk 51 bungkus. 2 tahun pertama usaha kerupuk ini tidak berjalan dengan sukses. Pada Tahun 1998 usaha tersebut baru bisa berjalan dengan lancar sampai kemudian bisa merekrut orang. Pertama kali hanya mempekerjakan 2 orang dan mereka masih ikut terlibat dalam pembuatan kerupuk, seperti mencetak kerupuk dengan alat yang masih tradisional yaitu muter-muter baru adonannya bisa keluar dan dicetak.

Tahun 2000 karyawannya bertambah menjadi 4, setelah 2 tahun lagi karyawan bertambah menjadi 8 karyawan, bertambah terus menjadi 12 orang. Kemudian Tahun 2010 akhirnya mereka bisa membeli mesin pencetak yang modern tidak usah muter-muter orang lagi. Dengan adanya mesin cetak modern ini tidak memerlukan banyak karyawan dan hasil produksi bisa meningkat.

Pertama menjual kerupuk Ibu Kaseni keliling dari desa ke desa menggunakan sepeda ontel. Sepeda ontel yang dipakai berjualan keliling masih pinjam dari tetangga. Ibu Kaseni berjualan dengan cara menawarkan kerupuk ke orang-orang dan tidak di hiraukan oleh orang-orang karena logat bahasanya masih menggunakan logat Kota. Kemudian ada 1 orang yang beli itupun karena rasa kasihan. Ibu Kaseni berkeliling dari desa ke desa yang lain mulai habis subuh sampai dengan jam 1 malam.



Pada tahun-tahun sebelumnya para pekerja *home industry* kerupuk ini setiap harinya mendapat jatah makan sekali yaitu pada jam 12.00. Akan tetapi sekarang para pekerja laki-laki sudah tidak pernah mendapat jatah makan, dikarenakan tidak cocok dengan masakannya. Sedangkan pekerja perempuan untuk makan siangnya mereka masih mendapat jatah makan dari pemilik usaha. Kemudian setelah selesai sarapan mereka melanjutkan pekerjaan masing-masing.

Berakhirnya jam kerja di *home industry* kerupuk juga ditentukan yaitu pada jam 17.00. Apabila pada jam 17.00 terdapat pekerjaan yang belum selesai. Misalnya pada jam 17.00 masih banyak kerupuk yang belum dibungkus dan pada jam tersebut sudah waktunya pulang. Dalam hal ini, pekerja tidak harus menyelesaikan pekerjaan



Kemudian setelah di oven, kerupuk di pindahkan ke wadah yang terbuat dari kayu untuk kemudian dikeringkan. Pengeringan ini masih dilakukan secara alami yaitu dengan menggunakan cahaya matahari. Setelah kerupuk benar-benar kering dan sudah layak untuk proses selanjutnya. Maka kerupuk sudah siap untuk masuk dalam proses penggorengan. Penggorengan di sini tidak menggunakan pasir akan tetapi menggunakan minyak goreng. Setelah kerupuk digoreng, maka langkah selanjutnya kerupuk dibungkus dan siap untuk dijual kepada konsumen.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Yono, Wawancara, Bojonegoro, 15 Januari 2019.

membeli untuk dijual kembali dan ada yang hanya di buat untuk lauk makan.<sup>62</sup>

## E. Kontrak Kerja

Suatu hubungan kerja pasti harus adanya kontrak kerja antara pengusaha dengan pekerja. Kontrak kerja di *home industry* kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro tidak dilakukan secara tertulis, melainkan hanya dilakukan dengan secara lisan saja. Padahal kontrak kerja yang baik adalah dilakukan secara tertulis agar nantinya tidak timbul masalah yang tidak diinginkan.

Pemilik usaha *home industry* kerupuk Desa Sumberagung saat melakukan kontrak kerja hanya menyampaikan “kamu saya pekerjakan di sini di bagian ini dan bekerja mulai jam segini sampai segini saja”.<sup>63</sup> Padahal ada beberapa hal penting yang harus disampaikan pada saat melakukan perjanjian kerja seperti upah yang akan didapat pekerja, masa berakhirnya pekerjaan, dan sebagainya.

Beberapa hal diatas tersebut harus disampaikan pada saat melakukan kontrak kerja dikarenakan apabila pekerja diberitahu jumlah upah yang akan diterima sebelum mereka memulai pekerjaan, mereka akan termotivasi untuk dapat bekerja dengan semangat tinggi sehingga dapat memproduksi sesuai target. Kemudian berakhirnya pekerjaan juga harus disampaikan diawal karena pada saat kontrak kerja mereka akan

<sup>62</sup> Ibu Kaseni, Wawancara, Bojonegoro, 16 Januari 2019.

<sup>63</sup> Udin, Wawancara, Bojonegoro, 15 Januari 2019.

habis maka mereka bisa sambil mencari pekerjaan baru agar nantinya setelah keluar dari pekerjaan yang lama mereka tidak menganggur.

## F. Sistem Pengupahan

Upah di *home industry* kerupuk hanya disepakati oleh satu pihak yaitu pemilik usaha saja. Kesepakatan untuk menentukan upah seharusnya dari kedua belah pihak yaitu antara pekerja dengan pemilik usaha. Tujuannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik itu dari pihak pekerja ataupun pemilik usaha. Upah di *home industry* kerupuk ini termasuk paling besar dibandingkan dengan *home industry* kerupuk di kecamatan lain. Untuk sistem pengupahan di *home industry* kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro ada 2 yaitu sistem mingguan dan sistem borongan.

a. Sistem Mingguan

Dalam sistem mingguan ini, pemilik usaha memberikan upah kepada pekerja setiap minggu sekali yaitu tepatnya pada hari kamis. Upah yang diterima antar pekerja tentunya berbeda-beda. Untuk pekerja laki-laki di bagian pengadonan ini hanya 1 orang saja. Akan tetapi pekerja ini biasanya juga membantu menjemur hasil cetakan dan membantu menggoreng. Pekerja tersebut menerima upah sebesar Rp. 100.000 per harinya. Sedangkan pekerja laki-laki yang di bagian





pekerja B lebih lama kerjanya dibandingkan pekerja C. Jika upah antar keduanya disamakan, nantinya akan timbul rasa iri.<sup>65</sup>

### b. Sistem Borongan

Pemilik usaha memberlakukan sistem ini hanya kepada pekerja perempuan saja yaitu bagian pembungkusan saja yang berjumlah 4 orang. Pembayaran upah kepada pekerja sama dengan sistem mingguan yaitu pada hari kamis. Sistem pengupahan bagian ini dihitung dengan ketentuan setiap 1 plat plastik di beri harga Rp. 5000. Rata-rata setiap harinya masing-masing pekerja bisa menghabiskan sekitar 8 plat plastik.<sup>66</sup> Biasanya upah yang didapat pekerja per harinya sekitar Rp. 40.000. Pada sistem ini, pekerja tidak ditarget harus menghabiskan berapa plat plastik per harinya. Kecuali jika ada konsumen yang memesan kerupuk dalam jumlah banyak, maka pekerja harus menyelesaikan target tepat pada waktunya bagaimanapun caranya.

Selain dibidang pembungkusan, terdapat juga 1 orang pekerja perempuan yang membantu berjualan Ibu Kaseni di Pasar Ngraho, karena mata beliau sudah tidak normal lagi sehingga merekrut orang untuk membantu seperti memberi kembalian kepada konsumen, mengambilkan kerupuk, dan lain-lain. Pekerja tersebut setiap harinya

<sup>65</sup> Heri, Wawancara, Bojonegoro, 15 Januari 2019.

<sup>66</sup> Syeni, Wawancara, Bojonegoro, 15 Januari 2019.



# Analisis Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja *Home Industry* Kerupuk Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Bab ini terdiri dari 3 sub bab, pertama tentang analisis kontrak kerja. Sub ini menjelaskan bahwa kontrak kerja di *home industry* kerupuk Desa Sumberagung sudah sesuai Ekonomi Islam atau belum. Sub bab kedua tentang analisis penentuan upah kerja, sub bab ini menjelaskan bagaimana *home industry* kerupuk ini dalam menentukan upah pekerja. Sub bab ketiga tentang analisis pelaksanaan pembayaran upah, sub bab ini menjelaskan di *home industry* kerupuk dalam memberikan upah kepada pekerja sudah sesuai Ekonomi Islam atau belum.

Dalam Syari'at Islam menganjurkan dalam melakukan kontrak atau perjanjian kerja atau kontrak apapun itu wajib dinyatakan secara hitam di atas putih. Sebagaimana terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 282.

الَّتِي تَرْتَابُونَهَا... (البقرة: ٢٨٢)

Penjelasan dari ayat diatas bahwa selain berlaku untuk kegiatan bisnis dan kontrak utang, akan tetapi berlaku untuk semua jenis kontrak. Sehingga kontrak kerja yang paling baik adalah antara pekerja dengan pemilik usaha menulis kontrak dan semua yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja maupun hak dan kewajiban pemilik usaha ditulis di dalam kontrak tersebut. Hal ini untuk mencegah dari adanya masalah yang akan muncul di masa yang akan datang sehingga dapat menciptakan rasa kedamaian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa kontrak kerja di *Home Industry* Kerupuk Desa Sumberagung tidak dinyatakan secara tertulis. Kontrak kerja yang dilakukan antara pemilik

Dalam mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari, selain kontrak kerja yang secara tertulis, melainkan pada saat melakukan kontrak kerja pemilik usaha harus menyebutkan jumlah upah sebelum pekerjaan di mulai. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Nabi SAW.

Artinya: “Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd. Razzaq).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada *home industry* kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro tidak ada kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja dalam menentukan jumlah upah yang akan diterima pekerja. Upah langsung ditetapkan oleh sepihak saja yaitu



Hasil penelitian menunjukkan bahwa, para pekerja *home industry* kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro tidak merasa terbebani dengan pekerjaan yang diperintahkan oleh pemilik usaha. Sehingga mereka bekerja tidak dalam keadaan tertekan. para pekerja diberi upah sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam menentukan upah selain dua hal diatas yang harus diterapkan juga adalah asas kerelaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam Surat an-Nisaa':29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali



Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penentuan upah di *home industry* Desa Sumberagung sudah menerapkan asas kerelaan. Karena para pekerja sudah saling rela atas jumlah upah yang diterimanya. Meskipun upah yang diterimanya tersebut dibawah UMK.

Pada dasarnya, permasalahan mengenai upah bukan hanya berkaitan dengan soal uang saja, akan tetapi lebih kepada wujud saling tolong menolong dan memberi penghargaan terhadap sesama atas apa yang sudah dikerjakan. Islam sangat menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dimana antara manusia satu dengan manusia lainnya saling membutuhkan.

pemilik usaha dapat terpenuhi. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia dengan kedudukan yang berbeda supaya antara manusia yang satu dengan lainnya dapat saling tolong menolong.

Dalam suatu hubungan pekerjaan khususnya persoalan pengupahan. Adanya kesepakatan dalam menentukan waktu pembayaran upah maupun jumlah upah yang akan di terima sangat dianjurkan dalam Islam, supaya pekerja maupun pemilik usaha dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berjalan dengan baik sehingga tercipta hubungan kerja yang baik juga.

Dalam Islam sudah diatur bahwa dalam melaksanakan pembayaran upah kepada pekerja harus tepat waktu dan tidak boleh ditunda-tunda. Sebagaimana terdapat dalam hadits nabi SAW berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ

يَجِفُّ عَرَقُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.

Penjelasan hadits diatas bahwa pemberian upah kepada pekerja tidak boleh dianggap sebagai masalah yang kecil oleh pemilik usaha. Pembayaran upah merupakan kewajiban pemilik usaha yang harus secepatnya diberikan kepada pekerja atas suatu pekerjaan yang sudah dilakukannya. Dalam pembayaran upah tidak boleh adanya penundaan tanpa adanya alasan tertentu. Apabila dalam pembayaran upah ada

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَيْنِ ظَلَمٌ  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Berdasarkan hasil penelitian, *home industry* kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro menggunakan sistem upah mingguan, dimana setiap satu minggu sekali upah pekerja akan dibayarkan yaitu pada hari kamis. Pemilik usaha *home industry* kerupuk Desa Sumberagung dalam melaksanakan pembayaran upah tidak pernah menunda-nunda. Beliau selalu membayarkan upah pekerja tepat pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan hadits nabi diatas.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Terdapat dua isu yang diamati dalam proses pengupahan tenaga kerja, pertama kepastian nilai upah dan durasi kerja. Karena kedua hal tersebut menjadi alat hitung untuk menentukan jumlah upah yang akan diterimanya, mereka dapat mengira-ngira apakah dengan hasil pendapatan dari bekerja ditempat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dan keluarganya

Bab ini terdiri dari 2 sub bab, sub bab pertama yaitu kesimpulan, yang berisi tentang pengupahan tenaga kerja yang ada di *home industry* kerupuk Desa Sumberagung Ngraho Bojonegoro serta pengupahan tenaga kerja yang ada di *home industry* kerupuk Desa Sumberagung ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Sub bab kedua yaitu saran, berisi tentang saran bagi pemilik usaha *home industry* kerupuk dalam hal pengupahan yang sesuai dengan Ekonomi Islam.

### A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan pembahasan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pemilik usaha *home industry* kerupuk Desa Sumberagung dalam melaksanakan pembayaran upah kepada pekerja tidak pernah menunda-nunda dan selalu tepat waktu. Akan tetapi, pada saat melakukan perjanjian kerja pemilik usaha tidak menyebutkan jumlah



2003.

Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya

Amril Fahmi, Muhammad Riza dan Tri Novita. “Sistem Kerja Pegawai Pada Home Industri Bolu Ikan Di Kota Pekanbaru” *Thesis* Vol. 1 No. 1 2017.

Amir, M. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Amir, M. *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip dan Aplikasinya)*. Prenadamedia Group, 2012.

Amir, M. *Etika Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

- 73

- Idri. *Hadith Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadith Nabi)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kurnia, Ade et.al. “Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel”. *Jurnal Iqtisaduna* 4 (1), 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mustafa'ah, Suqiyah et al. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy dalam Hukum Islam)*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Pasaribu, Chairuman et al. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 121 Tahun 2016, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 75 Tahun 2017, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016.
- Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan 2019 Kabupaten Bojonegoro.
- QS. Al-Baqarah : 279.
- QS. Al-Baqarah : 233.
- QS. An-Nahl : 90.
- QS. An-Nisaa' : 29.

